

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gadjong, Agussalim Andi, 2005, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Krisnayudha, Backy, 2016, *Pancasila dan Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta .
- Maria Farida Indrati. et al., 2016, *Teori Perundang-Undangan*, Universitas Terbuka, Banten.
- Huda, Ni'matul, 2009, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusa Media, Bandung.
- Sarwoto, 1981, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- HR, Ridwan, 2007, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Tjandra, Riawan, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lotulung, Paulus Effendie, 1986, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Simabura, Charles, 2011, *Parlemen Indonesia Lintas Sejarah dan Sistemnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari, 2007, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wahjono, Padmo, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mahfud MD, Moh, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Angelina Rebeca, 2022

ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PEMBENTUKAN PERDA YANG BERKUALITAS PASCA PUTUSAN MK NO. 137/PUU-XIII/2015 DAN 56/PUU-XIV/2016

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

- Soedarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Mahfud MD, Moh., 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, 2014, *Politik Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Lubis, M. Solly, 2014, *Politik Hukum dan Kebijakan Publik (Legal Policy and Public Policy)*, Mandar Maju, Bandung.
- HR, Ridwan, 2009, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Huda, Ni'matul, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.
- Lotulung, Paulus Effendie, 1986, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2004, *Perihal Undang-Undang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2003, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, FH UII Press, Yogyakarta.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187).

Angelina Rebeca, 2022

ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PEMBENTUKAN PERDA YANG BERKUALITAS PASCA PUTUSAN MK NO. 137/PUU-XIII/2015 DAN 56/PUU-XIV/2016

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 137/PUU-XIII/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (PERMA No. 1 Tahun 2011).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi.

Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pengawasan.

Karya Ilmiah

Nasution, Ali Imran, 2020, *Keabsahan Peraturan Daerah Memasukkan Peraturan Bersama Menteri sebagai Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Daerah*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 9, No. 2, <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v9i2.7901>

Laksana, I Putu Dedy Putra, 2019, *Pengawasan Represif Pemerintah Pusat dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 4 No. 1, <https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.i01.p11>

Layuck, Kezia M., 2020, *Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat Menurut UU Nomor 9 Tahun 2015*, Jurnal Lex Administratum, Vol. VIII, No. 3, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/29760>

Angelina Rebeca, 2022

ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PEMBENTUKAN PERDA YANG BERKUALITAS PASCA PUTUSAN MK NO. 137/PUU-XIII/2015 DAN 56/PUU-XIV/2016

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

- Novandra, Riza, 2019, *Pengawasan Peraturan Daerah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU-XIV/2016*, Jurnal RechtIdee, Vol. 14, No. 2, <https://doi.org/10.21107/ri.v14i2.4764>
- Firdaus, 2019, *Refleksi Konstitusionalitas Pengawasan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015*, Jurnal Konstitusi, Vol. 16, No. 2, <https://doi.org/10.31078/jk1629>
- Berry, Michael Frans, 2018, *Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan*, Muhammadiyah Law Review 2, Vol.2, No. 2, <http://dx.doi.org/10.24127/lr.v2i2.1461.g955>
- Setiadi, Wicipto, 2011, *Naskah Akademik Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8, No. 4, <http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/6114>
- Taupiqurrahman, dan Ali Imran Nasution, 2020, *Fungsi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Bungo*, Supermasi Jurnal Hukum Vol. 2, No. 2, <https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i1.121>
- Meidiana, 2019, *Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-undangan oleh Mahkamah Konstitusi*, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 2, <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.381-408>
- Anna Triningsih, 2016, *Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam Penyelenggaraan Negara*, Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 1, <https://doi.org/10.31078/jk1316>
- Triningsih, Anna, 2016, *Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam Penyelenggaraan Negara*, Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 1, <https://doi.org/10.31078/jk1316>
- Setiawan, Andri, Antikowati, dan Bayu Dwi Anggono, 2021, *Kekuatan Mengikat Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Kostitusi Terhadap Putusan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Agung*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 18, No. 1, <https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.796>

- Aziz, Machmud, 2010, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 5, <https://doi.org/10.31078/jk%25x>
- Chandranegara, Ibnu Sina, 2012, *Pengujian Perppu terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional antar-Lembaga Negara; Kajian atas Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009*, Jurnal Yudisial, Vol. 5, No. 1, <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v5i1.158>
- Arisandi, Dita Dwi dan Lilik Pudjiastuti, 2017, *Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Bidang Perizinan*, Jurnal Perizinan di Era Citizen Friendly, <http://hdl.handle.net/11617/9410>
- Setio, Stevanus Evan, 2013, *Fungsi Legislasi DPD dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 2, No. 2, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2013.v02.i02.p02>
- Winata, Muhammad Reza, Mery Christian Putri, dan Zaka Firma Aditya, 2018, *Legal Historis Kewenangan Pengujian Dan Pembatalan Peraturan Daerah Serta Implikasinya Terhadap Kemudahan Berusaha*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 7, No. 3, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i3.266>
- Pakpahan, Rudy Hendra, 2013, *Analisis Prosedur Pengujian Peraturan Daerah*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 10, No. 1, <http://lib.law.ugm.ac.id/ojs/index.php/jli/article/view/3368>
- Lule, Alwadud, 2021, *Dualisme Pengujian Peraturan Daerah: Legitimasi Konstitusional Dan Mengakhiri Ambivalensi Penyelesaian Hukum*, Jurnal Crepido, Vol. 3, No. 2, <https://doi.org/10.14710/crepido.3.2.110-119>
- Yuswanto, 2018, *Diskursus Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016*, Jurnal Konstitusi, Vol. 15, No. 4, <https://doi.org/10.31078/jk1542>
- Susskin, Richard, 2010, *Legal Information: a Personal Appraisal of Context and Progress*, European Journal of Law and Technology, Vol. 1. No. 1, <https://ejlt.org/index.php/ejlt/article/view/18>

- Isrok, 2009, *Korelasi Antara Peraturan Daerah (Perda) Bermasalah Dengan Tingkat Investasi Ke Daerah*, Jurnal Hukum, Vol. 16, No. 4, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss4.art7>
- Suharjono, Muhammad, 2014, *Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah*, DIH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 19, <https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.281>
- Mastur, dan Ananta Surya, 2021, *Tinjauan Yuridis Pembatalan Perda Melalui Judicial Review Pada Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol. 14, No. 2, <http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v14i2.5593>
- Kurniawati, Yuniar, 2016, *Polemik Pengujian Peraturan Daerah (UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Versus UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Jurnal Litigasi Kementerian Hukum dan HAM, Vol. 13, No. 4, [https://www.neliti.com/publications/45386/laporan-kajian-
implementasi-pengawasan-perda-oleh-pemerintah-dan-mahkamah-agung](https://www.neliti.com/publications/45386/laporan-kajian-implementasi-pengawasan-perda-oleh-pemerintah-dan-mahkamah-agung)
- Tesano, 2015, *Hirarkhisitas Kedudukan Peraturan Menteri Dengan Peraturan Daerah Dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*, Jurnal Nestor Magister Hukum, Vol. 2, No. 2, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/10250>
- Nadeak, Vinchia Yohana Retta, 2020, *Sinkronisasi Kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-undangan Melalui Mediasi Dikaitkan Dengan Kewenangan Judicial Review Mahkamah Agung*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 7, No. 1, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/28557>
- Setio, Stevanus Evan, 2013, *Fungsi Legislasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 2, No. 2, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2013.v02.i02.p02>

Angelina Rebeca, 2022

ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PEMBENTUKAN PERDA YANG BERKUALITAS PASCA PUTUSAN MK NO. 137/PUU-XIII/2015 DAN 56/PUU-XIV/2016

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Zarkasi, A., 2011, *Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah*, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Vol. 2, No. 1, <https://media.neliti.com/media/publications/43257-ID-pengawasan-terhadap-peraturan-daerah.pdf>

Skripsi/Tesis/Disertasi

Budiputra, I.G.E., 2015, *Dualisme Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi dengan Peraturan Presiden & Peraturan Menteri Dalam Negeri*, Tesis Universitas Udayana, Bali, hlm. 4.

Aditya, Zaka Firma, 2017, *Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Retroaktif Dan Akibat Hukumnya*, Thesis Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. I.

Ibrahim, Anis, 2008, *Legislasi Dalam Perspektif Demokrasi: Analisis Interaksi Politik dan Hukum Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Jawa Timur*, Disertasi Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 135.

Domut, Muhammad Riyadh Rafsanjani Is, 2019, *Penguatan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pengawasan dan Evaluasi Peraturan Daerah serta Rancangan Peraturan Daerah*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, hlm. 56-57.

Sumber Lainnya

\Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia, 2011, *Laporan Kajian Implementasi Pengawasan Perda Oleh Pemerintah Dan Mahkamah Agung*, Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia.

Hikmahanto Juwana, 2006, *Penyusunan Naskah Akademik Sebagai Prasyarat Dalam Perencanaan Pembentukan Rancangan Undang-Undang*, Makalah Rapat Pembahasan Tahunan Prolegnas Pemerintah Tahun 2006, Departemen Hukum dan HAM, Cisarua Bogor.

Tim Penyusun, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka.

Taufiqurrahman Syahuri dkk, 2014, *Problematika Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM.

Angelina Rebeca, 2022

ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PEMBENTUKAN PERDA YANG BERKUALITAS PASCA PUTUSAN MK NO. 137/PUU-XIII/2015 DAN 56/PUU-XIV/2016

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

- M Nur Sholikin, dkk, 2011, *Laporan Kajian Implementasi Pengawasan Perda Oleh Pemerintah Dan Mahkamah Agung*, Pusat Kajian Hukum Dan Kebijakan Indonesia, Jakarta.
- Miko Adiwibowo, 2019, *Artikel Hukum Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, Biro Hukum Dan Ham Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.
- Teuku Mohammad Radhie, *Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Majalah Prisma No.62 Tahun II, Desember 1973.
- <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/asas-materi-muatan-dalampembentukan-peraturan-daerah>, diakses pada tanggal 10 Mei 2022 pukul 12.01 WIB.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/praktik-legislative-review--judicial-review-di-republik-indonesia-cl1105>, diakses pada tanggal 12 Mei 2022 pukul 14.47 WIB.
- <https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/pengaturan-executive-review-terhadap-peraturan-daerah-kabupatenkota>, diakses pada tanggal 12 Mei 2022 Pukul 16.02 WIB.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/praktik-legislative-review--judicial-review-di-republik-indonesia-cl1105>, diakses pada tanggal 12 Mei 2022 Pukul 16.46 WIB.
- <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan82#:~:text=Pengawasan%20adalah%20proses%20dalam%20menetapkan,action%20to%20ensure%20desired%20results.>, diakses pada tanggal 6 Mei 2022 pukul 22.16 WIB.
- <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/211482/kemendagri-25-perda-tumpang-tindih-dengan-aturan-yang-lebih-tinggi>, diakses pada tanggal 23 Mei 2022 pukul 17.03 WIB.
- <https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/pengaturan-executive-review-terhadap-peraturan-daerahkabupatenkota>, diakses pada tanggal 2 Juni 2022 pukul 12.37 WIB.

Angelina Rebeca, 2022

ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PEMBENTUKAN PERDA YANG BERKUALITAS PASCA PUTUSAN MK NO. 137/PUU-XIII/2015 DAN 56/PUU-XIV/2016

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/praktik-legislative-review--judicial-review-di-republik-indonesia-cl1105>, diakses pada tanggal 2 Juni 2022 pukul 14.51 WIB.

https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=3109:di-jepang-tumpang-tindih-uu-dan-perda-bermasalah-nyaris-tak-ada&catid=268&Itemid=73, diakses pada tanggal 8 Juni 2022 pukul 10.04 WIB.